



**SATPOL PP
KABUPATEN
PEMALANG**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**SATPOL PP
KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Suro Hadikusumo No. 6 Kebondalem Pemalang 52312

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Gambar iii

Kata Pengantar iv

Lembar Pernyataan v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistimatika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN 2023 8

 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
 Capaian Renstra 8

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ... 23

 2.4. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
 Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26

 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 26

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27

 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 30

BAB V PENUTUP 56

 5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan Perhatian

 5.2. Kaidah kaidah Pelaksanaan

 5.3. Rencana Tindak Lanjut

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra PD s/d 2023
Tabel 2.2	: Pencapaian kinerja Pelayanan Satpol PP Tahun 2021-2026
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Kabupaten Pemalang hasil Musrenbang tahun 2025
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Satpol PP tahun 2025
Tabel 4.1	: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan alir penyusunan Renja Satpol PP Th. 2025
- Gambar 2.1 : Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Gambar a : Komposisi Pegawai Satpol PP menurut golongan tahun 2023
- Gambar b : Komposisi Pegawai Satpol PP menurut pendidikan tahun 2023
- Gambar c : Komposisi tenaga non ASN menurut pendidikan tahun 2023
- Gambar d : Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per Kecamatan tahun 2023 berdasarkan gender/jenis kelamin
- Gambar 2.1 : Data Relawan Kebekaran dalam binaan Satpol PP desa/kelurahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, karena atas ijin dan perlindungan Nya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya. Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang terdiri dari 3 (enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.993.078.400,- (Dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dialokasikan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Pemalang, 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pemalang


Drs. ACHMAD HIDAYAT, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730407-199311 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Renca Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Pemalang, 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pemalang

Drs. ACHMAD HIDAYAT, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197304071993111001



U. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.. Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Satuan Polisi Pamong Praja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RKPD. Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan; meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja, orientasi mengenai Renja Satuan Polisi Pamong Praja, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal; meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan tahap penyajian rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyusunan rancangan; meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja, verifikasi dan penyelarasan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Perumusan rancangan akhir; merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi rancangan akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
6. Penetapan; meliputi kegiatan verifikasi rancangan akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Gambar 1.1

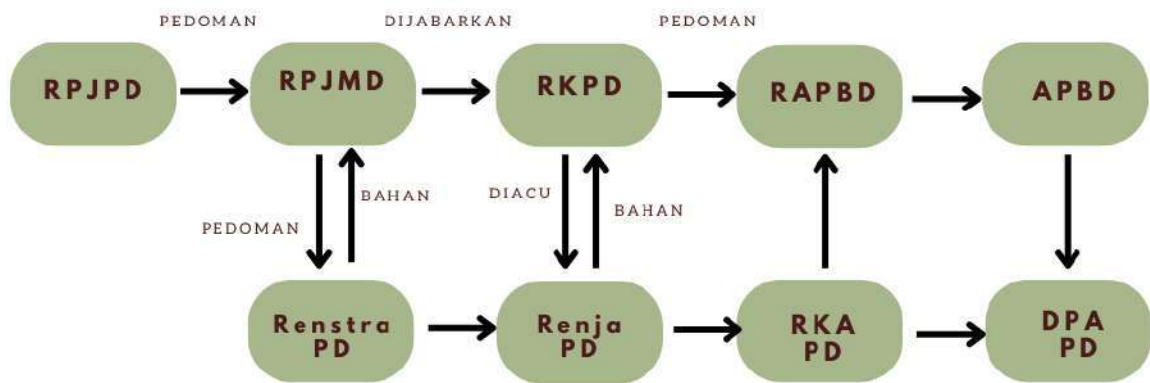
Bagan Alir Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025



Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025.

Gambar 2.1

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun RKA Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025 berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. Lembar Pernyataan : Lembar Pernyataan Kepala PD berisi Kepala PD pernyataan bahwa Renja PD yang disusun menjadi tanggung jawab Kepala PD untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, guna pencapaian target kinerja baik PD maupun kinerja daerah.

- B. BAB I Pendahuluan : Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
- C. BAB II Hasil Evaluasi : Pada bab ini menguraikan evaluasi Rencana Kerja pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Perangkat Daerah Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
- D. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah : Bab ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
- E. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah : Bab ini menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator. Target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD
- F. BAB V Penutup : Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2023

Jumlah anggaran penetapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sebesar Rp.12.803.684.000 yang terbagi dalam 3 program, 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.569.447.367,- (98,17%)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang realisasi capaiannya memenuhi target yang ditetapkan dan melebihi target yang ditetapkan yaitu:

- a. Terdapat beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan, diantaranya yaitu:
 - 1) Prosentase adanya gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dengan target kinerja sebesar 96 dan realisasinya sebesar 100;
 - 2) Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum dengan target kinerja sebesar 7,14 dan realisasinya sebesar 14,29;
 - 3) Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP dengan target kinerja sebesar 85,89 dan realisasinya sebesar 83;
 - 4) Rasio kejadian kebakaran dengan target sebesar 84 dengan realisasi sebesar 60
 - 5) Cakupan pelayanan kebakaran dengan target kinerja sebesar 35 dan realisasinya sebesar 19,62.

- b. Terdapat indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu, persentase rasio kebakaran dengan target kinerja 84 dan realisasinya hanya 60, cakupan pelayanan kebakaran dengan target 35 dan dengan realisasi sebesar 19,62 serta indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP dengan target kinerja 85,89 realisasi sebesar 83.
- c. Dari 10 (sepuluh) kegiatan yang ada semua kegiatan telah mencapai atau memenuhi dari target yang ditetapkan sehingga mendapat status capaian sangat tinggi.
- d. Dari 41 (Empat puluh satu) sub kegiatan yang ada telah mencapai target baik fisik maupun keuangannya

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota;
- 4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

2. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 4) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran
 - a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 4) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 5) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- 3) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui faktor – faktor penyebab realisasi baik, belum sesuai, sesuai maupun melebihi target. Hal ini dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. Pengoptimalan SDM dan sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen;
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait, kecamatan, pemerintahan desa dan masyarakat.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang adalah Program dan Kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

Masih terdapat capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga ke depan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan.

Adapun Langkah – Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peran dan Kerja Cepat dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Mengoptimalkan Media Sosial baik melalui Instagram, Facebook, dan SMS Centre / Whatsapp dalam Aduan Masyarakat terkait penanganan gangguan

Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk pengaduan masyarakat adanya Whatsapp La - Lisa

3. Menambah jangkauan pelaksanaan Patroli wilayah di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang untuk peningkatan ketentraman, ketertiban dan Keamanan wilayah.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi tentang Perda dan Perkada
5. Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas dan Aparatur Pemadam Kebakaran.
6. Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan membangun Pos Damkar di Wilayah Kecamatan sehingga tingkat waktu tanggap (respon time rate) pemadaman kebakaran lebih cepat
7. Pembentukan Relawan Kebakaran di setiap Desa / Kelurahan atau Kecamatan dibawah binaan seksi Pemadam Kebakaran.
8. Adanya Dukungan sarana prasarana kebakaran dengan penambahan armada yang volumenya kecil untuk bisa menjangkau wilayah yang susah dilalui kendaraan besar, sarana dan prasarana pendukung seperti baju tahan api, dll serta penambahan SDM untuk pemadam kebakaran.

Table 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang Jaya

kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th.2024)	Tingkat capaian realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Nilai IRB	51,23 61,80	61,90 -	48,23 58,05	61,9 -	128,34 -	49,23 59,21	61,90 -	51,23 61,80
1	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja peringkat daerah	130	100	11	11	100	10	6	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	100	2	2	100	2	1	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1	100	1	1	100	1	1	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	100	1	1	100	1	0	
				04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	100	1	1	100	1	1	
				05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen perubahan	1	100	1	1	100	1	0	

					Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD								
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2	100	2	2	100	3	2	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Perangkat Daerah	1	100	1	1	100	1	0	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	66	100	63/14	63/14	100	56/14	56/14	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	100	1	1	100	1	0	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	72	100	11	11	100	1	0	
1	05	01	2..06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang tersedia								
				01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	100	2	2	100	5	4	
				03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	108	100	3	3	100	3	3	
				04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	18	100	9	9	100	7	4	
				05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	100	2	2	100	2	1	
				06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	100	12	12	100	12	7	
				09	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Jumlah laporan penyeleng	1.200	100	200	200	100	150	87	

					dan konsultasi SKPD	garaan rapat koordinasi dan konsultasi								
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		100	8	8	100	2	1	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		100	48	48	100	12	6	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		100	145/12	145/12	100	12	6	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya		100	35	35	100	32	14	
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		100	16	16	100	15	1	
				09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		100	2	2	100	3	2	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota									
				01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui detekdi dini fan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patrol, pengamanan dan pengawalan		146	100	146	146	94	85	
				02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan		100	20	20	100	10	5	

					kerusuhan massa	kerusuhan massa yang dilakukan penindakan								
				03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentera man dan ketertiban umu dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / kota		100	5	5	100	6	3	
				04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum		100	3	3	100	2	1	
				05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		100	40	40	100	40	12	
				06	Kerjasama antar lembaga dan kemitaaan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan		100	3	3	100	3	3	
				09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan perkara	Jumlah laporan penyediaan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani		100	1	1	100	5	4	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati i/ walikota									
				01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksa naan sosialisasi penegakan Perda/ Perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat /pelaku usaha		100	10	10	100	8	8	
				02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peratu ran daerah dan peraturan Bupati /walikota		100	12	12	100	12	6	
				03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah lapran pelaksanaan penanganan atas pelanggaran		100	160	160	100	203	40	

					Peraturan Bupati / Walikota	peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yang dapat ditangani sesuai SOP								
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									
				01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			100	1	1	100	1	0	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1	05	04	2.01		Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota									
				01	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya		100	4	4	100	1	1	
				02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota		240	75	180	240	80	34	
				03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / evakuasi saat penanggulangan kebakaran fan non kebakaran		100	10	10	100	11	11	
				07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		100	10	10	100	3	0	

				09	Penyelenggaraan Kerjasama dan coordinator antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten /kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			5	5	100	3	2	
1	05	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
				01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya		100	290	290	100	1400	0	
				02	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya		100	1	1	100	1	0	
				03	Dukungan pemberdayaan masyarakat / relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras Damkar		100	1	1	100	1	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten pemalang yang dianalisis merupakan berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana strategis Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, Sub Urusan Kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat,

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, mempunyai fungsi;

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia menurut jenis golongan, pendidikan dan tenaga non ASN. Dalam

mendukung tugas pokok dan fungsinya Satpol PP juga didukung SDM Satlinmas dan Relawan Kebakaran, adapun data kami sajikan dalam tabel, dibawah ini :

1. SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

Komposisi Pegawai Satpol PP menurut Golongan
Tahun 2023

No	Pangkat/Golongan	Jumlah menurut Gender		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	IV	3	2	5	
2.	III	20	2	22	
3.	II	33	-	33	
4.	I	1	-	1	
	Jumlah	57	4	61	

Sumber : Data kepegawaian Satpol PP 2023

2. SDM berdasarkan Pendidikan

Komposisi Pegawai Satpol PP menurut Pendidikan
Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah menurut Gender		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	S-2	2	2	4	
2.	S-1	12	2	14	
3.	D -3/4	2	-	2	
4.	SMA	38	-	38	
5.	SMP	3	-	3	
6.	SD	-	-	-	
	Jumlah	57	4	61	

Sumber : Data kepegawaian Satpol PP 2023

3. SDM berdasarkan Tenaga Non ASN

Komposisi Tenaga Non ASN menurut Pendidikan
Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah menurut Gender		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	S-2	-	-	-	
2.	S-1	26	5	31	
3.	D -3/4	3	2	5	
4.	SMA	96	12	108	
5.	SMP	1	-	1	
6.	SD	-	-	-	
	Jumlah	126	19	145	0,13

Sumber : Data kepegawaian Satpol PP 2023

4. SDM Satlinmas

**Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per Kecamatan tahun 2023
Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender**

No.	Kecamatan	Jml Desa	Jumlah Linmas	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	perempuan
1.	Ulujami	18	793	768	25
2.	Comal	18	989	968	21
3.	Ampelgading	16	803	794	9
4.	Bodeh	19	726	721	5
5.	Petarukan	20	1.224	1.220	4
6.	Taman	21	1.326	1.303	23
7.	Pemalang	20	986	977	9
8.	Bantarbolang	17	739	734	5
9.	Randudongkal	18	587	575	12
10.	Moga	10	334	330	4
11.	Warungpring	6	224	220	4
12.	Pulosari	12	280	276	4
13.	Belik	12	698	698	0
14.	Watukumpul	15	688	686	2
	Jumlah	222	10.397	10.270	127

Sumber data : Bidang Linmas Satpol PP tahun 2023

5. SDM Relawan Kebakaran

**Gambaran e
Data Relawan Kebakaran dalam Binaan Satpol PP
Desa/Kelurahan Per Kecamatan tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jml Desa	Jumlah Redkar	Keterangan
1.	Ulujami	-	-	-
2.	Comal	-	-	-
3.	Ampelgading	1	15	Desa Tegalsari Barat
4.	Bodeh	-	-	-
5.	Petarukan	-	-	-
6.	Taman	-	-	-
7.	Pemalang	1	10	Desa Pegongsoran
8.	Bantarbolang	-	-	
9.	Randudongkal	-	-	
10.	Moga	1	15	Desa Gendowang
11.	Warungpring	-	-	-
12.	Pulosari	4	40	Desa Penakir, Ds. Karang sari, Ds.Gunungsari dan Ds. Nyalembeng
13.	Belik	-	-	
14.	Watukumpul	-	-	
	Jumlah	7	80	

Sumber data : Uptd Damkar Satpol PP 2023

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
Kabupaten Pemalang

No.	Indicator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Tareget Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	V	-	-	23	25	27	30	-		27	30	
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	V	-	-	3.300	3.400	3.500	3.600	1.260		3.500	3.600	
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	-	V	V	100	100	100	100	100	-	100	100	
4.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	V	V	70	75	80	85	100		80	85	
5.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	-	V	V	75	80	85	90	93,65		85	90	
6.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kel	%	-	V	-	20,27	27,03	33,79	40,55	1,35		33,79	40,55	
7.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	-	V	-	42,86	50	57,14	64,29	0		57,14	64,29	
8.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	-	V	V	68,5	69,5	70,5	71,5	66,66		69,5	71,5	
9.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	kasus	-	-	V	90	95	100	105	102		100	105	
10.	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	-	-	V	6.744	7.325	7.907	8.488	0		7.907	8.488	
11.	Jumlah Perda dan perkada yang ditegakkan	Perda/ perbub	-	-	V	17	18	19	20	17		19	20	
12.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang	-	-	V	4	4	5	6	4		5	6	
13.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	-	-	V	14	15	16	17	12		16	17	
14.	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	%	-	-	V	70%	80%	90%	100%	-		90%	100%	
15.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	orang	-	-	V	350	360	370	380	488		370	380	
16.	Tersedianya pos sector damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	pos	-	-	V	6	7	8	9	3		8	9	
17.	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	orang	-	-	V	144	168	192	216	46		192	216	
18.	Tersedianya pos sector damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di setiap desa/kelurahan	pos	-	-	V	6	7	8	9	3		8	9	
19.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	unit	-	-	V	180/24	185/25	195/26	200/27	180/24		195/26	200/27	
20.	Jumlah aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi pemadam	orang	-	-	V	25	30	35	40	32		35	40	
21.	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan uptd damkar	orang	-	-	V	90	90	90	90	80		90	90	
22.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	orang	-	-	V	25	30	35	40	10		35	40	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Kepala Daerah
- c. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanakoordinas penegakan perda dan perkada , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokkan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pematang, sebagaimana uraian berikut :

1. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran;
2. Penegakan Perda/Perkada masih belum Optimal sehingga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum kurang mematuhi dan mentaati Perda/Perkada;
3. Belum Optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
4. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;

5. Kurangnya Jumlah Aparatur/Personil Satpol PP dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP;
6. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah;
7. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum;
8. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
9. Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran
10. Masih kurangnya peningkatan Kapasitas bagi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
11. Masih kurangnya Sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dari beberapa isu tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, yaitu :

- 1) Masih adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran.

2.4. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-

pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Melalui pelaksanaan musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Secara umum semua kebutuhan masyarakat yang tertampung pada hasil musrenbang maupun melalui pokok pikiran Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) telah terrealisasi berdasarkan skala prioritas dan sudah diakomodir dalam Recana kerja.

Untuk tahun 2025 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Kabupaten Pemalang (Hasil Musrenbang) Tahun 2025

Satpol PP Kab. Pemalang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 akan mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dengan 3 (tiga) arah kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2025 :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang merupakan tahun ke empat RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan implementasi *Smart City*
2. Peningkatan reformasi birokrasi
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa

5. Perlindungan, pelestarian, upaya pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2025 Kabupaten Pemalang tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke-2 yaitu **Peningkatan Reformasi Birokrasi**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang urusan wajib Pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong melalui peningkatan budaya literasi di masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel.

A. Tujuan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mempunyai 2 (dua) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu :

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah

1. Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Wilayah, serta
2. Meningkatkan kualitas penanganan Kebakaran

B. Sasaran

Sedangkan untuk Sasaran jangka menengahnya yang akan dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang adalah

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan Ketertiban umum,
2. Meningkatnya pelayanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan
3. Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran”.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2025 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indicator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondi si awal	Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meingkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah		Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	98	96	94	92	90	90
		Meningkat nya kepatu han masya ra kat ter hadap ke tentraman dan keter tiban umum	Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	0	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	14,29	14,29
		Meningkat nya pelaya nan kinerja satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP	skor	82,89	83,89	84,89	85,89	86,89	87,89	88,89	88,89
2	Meningkatkan kualitas pena nganan keba karan		Rasio kejadian kebakaran	%	90	88	86	84	82	80	78	78
		Meningkat nya kuali - tas pena - nganan kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran	%	20	25	30	35	40	45	50	50

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan faktor – faktor perumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah :

1. Menjabarkan/melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara sinergis dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya yang tertuang dalam program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Digital (Dedi), Desa Sinergi (Desi) dan Kota Industri (Koin).
3. Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pada tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya merencanakan sebanyak 3 program, 10 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kabupaten Pematang Jaya dengan kebutuhan dana sebesar Rp yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUA POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2025. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- d) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian beserta kelengkapannya
- b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
- b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- c) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- d) Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- f) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
- g) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- h) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- a) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b) Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- c) Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

C. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

- d) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalm Pencegahan Kebakaran

- a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- b) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- c) Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKAB. PEMALANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daerah Penan ggung Jawab
											Targe t 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sum ber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Satuan Polisi Pamong Praja						14.688.437.000						18.446.272.500		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.688.437.000							18.446.272.500	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.688.437.000							18.446.272.500	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP	-			50,23 skor	13.335.378.500						-	15.873.772.500	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-			9 Doku men	47.996.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	95.000.000	

	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Doku men	29.996.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		30.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Doku men	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		5.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Doku men	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		5.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		5.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		5.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		20.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Lapor an	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		25.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	-			26 Lapor an	7.902.525.000		Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	8.634.772.500	Satpol PP
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56/ 14 Oran g/bul an	7.894.025.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		8.599.772.500	Satpol PP

	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		10.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		20.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		5.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aktivitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Lapor an	5.500.000,00		Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	550.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	500.000,00	Kab. Pemala ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		400.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Oran g	5.000.000,00	Kab. Pemala ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		150.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-			96 Laporan	129.939.000,00		Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	305.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		20.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		5.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	27.439.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		50.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		30.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		15.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Lapor an	80.000.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		185.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aktivitas Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan PD	-			1 Unit	1.950.098.500	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	2.650.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.950.098.500	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel /Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		2.650.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aktivitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	-			29 Laporan	2.767.613.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	2.959.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		9.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	168.173.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		190.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		10.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.594.940.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		2.750.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aktivitas pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang terpelihara	-			46 Unit	531.707.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	680.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	324.707.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		375.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		15.000.000	Satpol PP
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				3 Unit	200.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		275.000.000	Satpol PP

	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				6 Unit	4.000.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		15.000.000	Satpol PP
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100			100 %	441.000.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m			Kab Pemalang	-	1.372.500.000	Satpol PP
							Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	85									Kab Pemalang			
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan Ketentrman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100			100 Kasus	357.900.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	1.107.500.000	Satpol PP

	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot a			6 Dok	47.000.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		135.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2 Dok	71.500.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		82.500.000	Satpol PP
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40		40 Oran g	31.500.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		110.000.000	Satpol PP

	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				3 Dok	17.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		175.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dok	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		7.500.000	Satpol PP
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				92 laporan	160.900.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		550.000.000	Satpol PP

	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Lapor an	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 6. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur secara Berkelanjutan	Kab Pemalang		30.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				5 Lapor an	3.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		17.500.000	Satpol PP

	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda Perbub yang didegalkan	20			19 Peraturan	82.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	250.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	200			1 Laporan	35.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		140.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	17.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		35.000.000	Satpol PP

	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	30.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		75.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-			5 Orang	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	15.000.000	Satpol PP
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		15.000.000	Satpol PP

3	1	05	04			PROGRAM PENCE GAHAN, PENANG GULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90			85 %	912.058.500	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m			Kab Pemalang	-	1.200.000.000	Satpol PP	
							Persentase pembentukan relawan kebakaran di desa / Kelurahan	40,53										Kab Pemalang			
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani	-			90 Kasus	111.938.500	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	255.000.000	Satpol PP	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a Setiap Tahunnya				1 Doku men	5.000.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		15.000.000	Satpol PP	

	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				90 Laporan	40.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		90.000.000	Satpol PP
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				10 Dokumen	15.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		25.000.000	Satpol PP
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				1 Orang	60.000	Kab. Pemalang, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		25.000.000	Satpol PP

	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				9 Unit	50.198.500	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		75.000.000	Satpol PP
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraa n Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kot a dalam Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				3 Doku men	1.680.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		25.000.000	Satpol PP
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah desa yang mempunyai relawan kebakaran	-			5 Desa/ Kelurahan	800.120.000	Kab. Pemala ng, Semua Kec Semua Kel/ Desa	Dana trans fer Umu m - Dana Alok asi Umu m	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang	-	945.000.000	Satpol PP

	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya				1400 Orang	800.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		900.000.000	Satpol PP
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	60.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		20.000.000	Satpol PP
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar				1 Dokumen	60.000	Kab. Pemalang, Semua Kec, Semua Kel/Desa	Dana transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi	Kab Pemalang		25.000.000	Satpol PP
	J U M L A H											14.688.437.000							18.446.272.500	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah :

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
2. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih *indikatif* sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2025 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025.